

RSUD Bendan mempunyai kapasitas 200 tempat tidur, namun yang dipergunakan baru 162 tempat tidur. Tolok ukur kinerja RS dengan BLUD dapat dinilai dari:

1. Kinerja Rawat Jalan

Kunjungan rawat jalan tahun 2010 sebanyak 22.177 orang, dengan rata-rata kunjungan perhari 63 orang, jadi masih kurang menurut standart yang ditetapkan oleh Kemenkes ( kunjungan pasien 420 – 32.474 berarti kinerja kurang). Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan RS yang masih baru, dan pelayanan Poli Spesialis belum lengkap (Lampiran 2).

2. Kinerja Rawat Inap

Kinerja pelayanan rawat inap dapat di lihat dari BOR tahun 2009 : 41,97 %, masih kurang, tahun 2010 : 61,73, sedang, BOR tahun 2010 ada kenaikan. LOS, TOI dan BTO menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan Hari Perawatan, GDR dan NDR masih sangat kurang (Lampiran 2).

3. Kinerja Keuangan

Tahun 2010 Pendapatan dari RSUD Bendan di target 6 Milyar, namun pada kenyataannya RSUD Bendan bisa memperoleh pendapatan sebanyak Rp 9.705.210.000; berarti bahwa kinerja keuangannya sudah baik. ( Sumber : RBA Tahun 2010 )

4. Kinerja Manfaat

Ratio pemakaian tempat tidur kelas III lebih dari 62,18 %, BOR kelas III 74,3 %. Persentase pasien tidak mampu 48,07 %. Kinerja manfaat RSUD Bendan baik sekali (standart : BOR 72 – 80% adalah baik sekali).

Dari data di atas RSUD Bendan sudah menunjukkan kinerja keuangan dan manfaat yang bagus, tetapi dengan penerapan PPK-BLUD masih ada hal-hal yang belum sesuai implementasinya menurut Permendagri Nomor 61 tahun 2007, diantaranya adalah:

1. Dalam kunjungan anggota DPRD ke RSUD Bendan pada tanggal 16 Juni 2010 ada anggota Dewan yang menanyakan kepada Direktur mengapa pendapatan dari RSUD Bendan tidak disetorkan ke kas Pemerintah Daerah, padahal menurut Permendagri Nomor 61 tahun 2007 pendapatan Rumah Sakit dengan BLUD langsung disimpan di kas BLUD dan bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
2. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) masih meminta RKA (Rencana Kerja Anggaran) untuk mendapatkan dana APBD, seharusnya untuk RS dengan PPK BLUD adalah RBA (Rencana Bisnis Anggaran).

Pengadaan Alkes, sebagai contoh untuk pembelian mycro dermabrasi untuk pelayanan poliklinik kulit dengan dana sekitar Rp. 22.000.000,- seharusnya bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, karena pengadaan alkes kurang dari 100 juta, apabila dibelanjakan dengan dana BLUD, proses pengadaannya bisa tidak memakai Keppres 80 / 2003. Namun menurut Kasie Renval, pimpinan BLUD tidak mengizinkan, dikarenakan menunggu anggaran APBD tahun 2011. Seharusnya dengan fleksibilitas keuangan pimpinan BLUD dapat menjamin ketersediaan barang atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan, demi mendukung